

## BAB II

### LATAR BELAKANG KEHIDUPAN RADEN AJENG TJITJIH WIARSIH

#### 2.1 Latar Belakang Keluarga Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih

Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih atau dikenal dengan nama *Juag* Tjitjih lahir pada 21 April 1901 di Cianjur, merupakan putri kedua dari Bupati Cianjur ke-10 yaitu Raden Aria Adipati Prawiradiredja II dengan pasangannya Raden Aijoe Radja Ningroem<sup>34</sup>. Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih lahir di Pendopo Cianjur dan tumbuh disana hingga menginjak usia remaja dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara, yaitu Raden Prawiraningrat, Raden Ajeng Widarsih, dan Raden Alibasah, namun ketiga anak Prawiradiredja II wafat pada usia anak-anak sehingga sehingga dari keempat anak Prawiradiredja II, Juag Tjitjih menjadi anak semata wayangnya dan memiliki peran bagi masyarakat Cianjur<sup>35</sup>. Prawiradiredja II sebagai ayah Raden Ajeng Tjitjih merupakan orang yang paling berkuasa di Cianjur dan menjabat sebagai bupati dari 1862-1910 yang tersohor akan sikap dermawannya, namun Raden Aijoe Ningroem sebagai ibunya kurang diketahui identitasnya.



Gambar 2. 1 Raden Ajeng Tjitjih

Sumber: Koleksi Bumi Ageung Cianjur

---

<sup>34</sup> Alnoza and Hidayah, "Penggambaran R.A. Tjitjih Wiarsih (1901-1964) Dalam Memori Kolektif Di Bumi Ageung, Cianjur," hlm. 237.

<sup>35</sup> Luki Muharam, *Cianjur Dari Masa Kemasa (Fakta Sejarah Dan Cerita Rakyat)*, hlm.161.

Raden Ajeng Tjitjih lahir dari keturunan *menak*, ayahnya merupakan Bupati ke-10 Cianjur dan kakeknya yang juga Bupati ke-9 Cianjur yang bernama Raden Aria Adipati Kusumaningrat atau dikenal dengan nama *Dalem* Pancaniti. Keluarga Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih termasuk *elite* birokrasi kolonial pangreh praja, yaitu suatu kasta penguasa setempat yang menjadi penghubung antara raja pusat dengan rakyat di daerah, pangreh praja sendiri harus berasal dari kalangan pribumi dengan kelas tertinggi diantara orang-orang pribumi lainnya<sup>36</sup>. Status tersebut memberinya akses terhadap jaringan sosial yang luas, hal ini dikatakan oleh Raden Pepet Djohar atau dikenal Aom Pepet yang merupakan cucu dari Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih, ia mengatakan bahwa neneknya menjalin persahabatan sedari kecil dengan anak-anak dari bupati lain, salah satu sahabat dekatnya adalah R.A. Goemari Soepitaningrat yang merupakan anak dari Bupati Galuh R.A.A. Koesoemasoebrata (1886-1914)<sup>37</sup>.

Persahabatan diantara keduanya tidak hanya terjalin erat dalam kehidupan keduanya namun menggambarkan kehidupan sosial di kalangan bangsawan sunda pada awal abad ke-20 yang menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga bangsawan. Kehidupan Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih di Pendopo sendiri tidak menutup akses dirinya terhadap lingkungan yang lebih luas, ia seringkali mengajak rekan sebayanya untuk berenang di *empang dalem* yaitu sebutan untuk kolam pendopo di kabupaten<sup>38</sup>. Pergaulannya yang luas menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan yang setara dengan siapa saja tanpa memandang status sosial, melalui kebiasaan ini terlihat bahwa Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih berupaya menciptakan harmoni diantara berbagai golongan masyarakat sehingga sejak usia anak-anak ia mampu menjadi penghubung berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Interaksi Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih dengan sahabatnya dari kalangan bangsawan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

---

<sup>36</sup> Novy Setia Yunas, "Kepemimpinan dan Masa Depan Reformasi Birokrasi Di Indonesia," *Dimensi-Jurnal Sosiologi* 9, no. 2 (2016), hlm.105.

<sup>37</sup> Raden Pepet Djohar, "Latar Belakang Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih" (Cianjur: Wawancara Penulis, n.d.).

<sup>38</sup> *Ibid.*

pembentukan karakter dirinya, ia juga belajar memahami berbagai perspektif sosial dan budaya di lingkungan sekitarnya.

Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih menghabiskan waktunya di Pendopo Cianjur hingga usia 9 tahun, karena pada tahun 1910 ayahnya meninggal dunia dan ia tidak lagi memiliki hak untuk tinggal disana <sup>39</sup>. Prawiradiredja II sebelumnya telah menyiapkan tempat tinggal untuk Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih karena dirinya menyadari bahwa ketika dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai bupati, anaknya tidak dapat lagi tinggal di Pendopo Cianjur. Hal ini erat kaitannya dengan takhta yang seharusnya di turunkan pada anaknya, namun mengingat bahwa Prawiradiredja II tidak memiliki anak laki-laki sehingga tidak ada penerus takhta dari keturunannya. Prawiradiredja II telah mempersiapkan sebuah rumah di sebelah timur Pendopo Cianjur dengan menggunakan dana pribadinya, untuk ditempati anaknya jika pendopo tidak lagi berada di bawah garis keturunannya. Prawiradiredja II juga telah mempersiapkan jodoh untuk Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih yaitu Wiranatakusumah V yang pada saat itu masih menjadi wedana di Cibeureum, Tasikmalaya. Wiranatakusumah V merupakan putra dari Bupati Bandung Raden Adipati Kusumadilaga yang ketika berusia tujuh tahun dijanjikan akan dijodohkan dengan anak Bupati Cianjur yang justru pada saat itu belum lahir, alasan perjodohan ini memungkinkan terjadi karena keluarga bupati-bupati Bandung periode sebelumnya memiliki ikatan kekeluargaan dengan keluarga bupati-bupati di Cianjur terutama pada garis keturunan Wiratanudatar, Perkawinan antara kerabat dekat pada kaum *menak* merupakan hal yang umum terjadi dan dimaksudkan untuk mempertahankan darah bangsawan serta mempertahankan status. Raden Aria Wiratanudatar I sebagai pendiri garis kepemimpinan di Cianjur dan keturunannya banyak yang tetap berada dalam lingkungan kekuasaan birokrasi, baik sebagai bupati maupun pejabat penting lainnya <sup>40</sup>.

Wiranatakusumah V sudah diangkat terlebih dahulu menjadi pejabat kabupaten Cianjur sebelum nantinya menjadi Bupati Cianjur pada tahun 1912 menggantikan Prawiradiredja II karena kedudukannya sebagai menantu Bupati

---

<sup>39</sup> *Op cit.*, hlm. 159.

<sup>40</sup> Nyai Mas Syarifah Didoh, *Babad Cianjur*, ed. Ilham Nurwansah, 2025th ed. (Cianjur: Kairaga Institute, 1974), hlm. 75.

sebelumnya, terkait perjodohannya dengan Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih tidak sampai tahap pernikahan. Hubungan diantara keduanya hanyalah sebatas “*kawin gantung*” yang mana hubungan ini kurang lebih sama seperti lamaran dan merupakan tradisi pada awal abad ke-19 yang terjadi antara anak-anak yang sebelumnya telah dijodohkan dan pihak perempuan yang telah dilamar tidak akan menerima pria lain<sup>41</sup>. Perjodohan diantara Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih dengan Wiranatakusumah V tidak sampai ke tahap pernikahan, hal ini dikarenakan adanya penolakan dari Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih ketika mengetahui bahwa Wiranatakusumah V sudah beristrikan beberapa perempuan. Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih sebagai pribadi yang tidak menyukai praktik poligami segera meminta kepada Wiranatakusumah V untuk menceraikannya, pendapat lain mengatakan bahwa pernikahan diantara keduanya tidak dilaksanakan karena ketika keduanya beranjak dewasa, mereka merasa lebih cocok sebagai saudara saja<sup>42</sup>. Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih kemudian menempati rumah yang telah disiapkan oleh ayahnya yang berada di sebelah timur alun-alun Cianjur, rumah pesanggrahan yang dikenal dengan sebutan Bumi Ageung Cianjur dimanfaatkan olehnya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungan disekitarnya.

Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih kemudian menikah dengan Raden Ngabehi Muhammad Jakin Wirjo Hadikoesoemo atau dikenal dengan nama Pak Yakin yang merupakan putra dari Bupati Bondowoso dan memiliki keturunan sebagai bangsawan dari Madura. Pertemuan keduanya berawal dari perpindahan Pak Yakin ke Cianjur dan bekerja sebagai administrator di Stasiun Cianjur, yang jika dilihat dari jaraknya hanya 250 m dari kediaman Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih sehingga keduanya sering bertemu<sup>43</sup>. Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih dan Raden Ngabehi Muhammad Jakin Wirjo Hadikoesoemo diperkirakan menikah pada tahun 1920 dan dikaruniai lima orang anak yaitu R. H. Utut Zenudin, R. Dicky Zaenudin, R.A. Tien Kuraesin, R.A. Lili Amatila, dan R.A. Tetet Saleha.

---

<sup>41</sup> Ila Hidatilah and Zein Bastian, “Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur,” *Jolsic: Journal of Law, Society, and Civilization* 10, no. 1 (2022), hlm. 35.

<sup>42</sup> Nina H. Lubis, “Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942,” 1998, hlm. 280.

<sup>43</sup> *Op.cit*, hlm. 163.

Pernikahan antar etnis (Sunda-Jawa) yang terjadi diantara keduanya dianggap tabu dalam budaya sunda, dimana hal ini bertentangan dengan larangan *estri ti luaran* dan dimaknai sebagai pantangan orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa, mitos ini dipercayai oleh masyarakat Sunda dan Jawa bahwa pasangan yang melanggar larangan tersebut tidak akan bahagia dan sering diterpa masalah <sup>44</sup>.

Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih dan Raden Ngabehi Muhammad Jakin Wirjo Hadikoesoemo tetap melaksanakan pernikahan karena berasal dari kalangan priyayi sehingga secara status tetap sepadan dan keduanya memiliki pemikiran rasional yang tidak sepenuhnya terikat pada tradisi lama, keduanya membuktikan bahwa mereka tetap bisa memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan hingga akhir hayatnya. Rumah pesanggrahan yang berada di luar pendopo menjadi tempat tinggal keduanya dengan anak-anak mereka hingga beranjak dewasa, namun ketika anak-anaknya sudah berumahtangga mulai meninggalkan Bumi Ageung, sehingga menyisakan Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih dan Raden Ngabehi Muhammad Jakin Wirjo Hadikoesoemo bersama beberapa cucunya, salah satunya Aom Pepet. pernikahannya diantara keduanya terjalin dengan harmonis dan Pak Yakin tidak melarang Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih untuk melakukan kegiatan-kegiatannya di luar rumah seperti berorganisasi, begitupun dengan Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih yang tidak pernah membatasi ruang gerak suaminya dalam berwirusaha. Keduanya menjadi pasangan yang saling mendukung satu sama lain, Pak Yakin mendampingi Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih hingga akhir hayat nya pada 13 Otober 1964.

---

<sup>44</sup> Nurul Uyun, "Membaca Mitos Dan Tradisi Dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis," *Populika* 111, no. 1 (2023): hlm. 25.



Gambar 2. 2 Pernikahan Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih dan Raden Ngabehi Muhammad Jakin Wirjo Hadikoesoemo (kanan)

Sumber: Koleksi Bumi Ageung Cianjur

## 2.2 Latar Belakang Pendidikan Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih

Pendidikan belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Hindia Belanda dan belum menyentuh masyarakat secara umum, diawal kekuasaannya pendidikan tidak diperhatikan secara serius karena mereka lebih fokus untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungannya pada bidang ekonomi bagi mereka. Pada awal abad ke-20 barulah terdapat politik baru yang perkembangannya berpedoman untuk peningkatan kemajuan rakyat yang disebut dengan *ethische politic* yang berarti politik haluan utama. Politik etis diberlakukan pada tahun 1901 diawali karena masalah kemanusiaan dan keuntungan ekonomi dengan menuntun rakyat pribumi kearah kemajuan namun tetap dibawah kolonial Belanda. Politik etis memberikan pendidikan bergaya eropa dan pemakaian Bahasa Belanda sebagai bahasa utamanya, sekolah-sekolah yang didirikannya dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai pemerintahannya<sup>45</sup>. Pendidikan yang diberlakukan pada saat itu sangat terbatas dan bersifat diskriminatif, dimana kesempatan untuk memperoleh pendidikan hanya dapat di akses oleh golongan bangsawan sedangkan golongan rakyat biasa tidak dapat mengakses pendidikan,

<sup>45</sup> Agus Susilo dan Isbandiyah, "Politik Etis dan Pengaruhnya bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia", *Historia Jurnal Program Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018), hlm. 407.

dan pendidikan ini di desain untuk mendukung kekuasaan kolonial untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dalam administrasi<sup>46</sup>. Terbatasnya akses terhadap pendidikan juga dikarenakan golongan bangsawan yang mampu untuk membayar biaya pendidikan dan memiliki hubungan yang dekat dengan pejabat Hindia Belanda sehingga mudah untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang dituju, hal ini juga dirasakan oleh Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih yang dapat memperoleh pendidikan gaya Barat.

Pendidikan pertama yang di peroleh oleh Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih adalah pendidikan agama yang diperoleh ketika dirinya masih tinggal di Pendopo Cianjur, pendidikan agama ia peroleh dari pesantren yang sama dengan ayah dan kakeknya, yaitu dari seorang *ajengan* Pondok Pesantren Ciharashas. Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih tidak hanya mendapatkan nilai-nilai keagamaan saja selama disana melainkan belajar nilai-nilai etika, moral dan kepemimpinan yang membentuk karakter dirinya, lingkungan pesantren yang disiplin menjadikan dirinya sebagai pribadi yang penuh akan tanggung jawab dan menghargai kebersamaan<sup>47</sup>. Pendidikan pesantren yang ia peroleh tidak menjadikannya merasa puas, ia memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan barat sebagai keturunan *menak* dari anak Bupati Cianjur. Kesempatan tersebut memberinya akses ke *Europeesche Lagere School* (ELS) yang berada di Sukabumi yang setara dengan Sekolah Dasar (SD) dengan masa sekolah 7 tahun diperuntukkan untuk keturunan Eropa dan *elite* pribumi dan Bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar utamanya<sup>48</sup>. Pada tingkatan dasar ini Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih memperelajari ilmu dasar seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, menyanyi, olahraga, ilmu bumi, dan Bahasa Belanda. Ilmu tersebut dirancang oleh pemerintah Hindia Belanda agar terbentuknya individu yang tidak hanya pandai secara akademik namun memiliki kemampuan yang memadai dan sesuai dengan

---

<sup>46</sup> Ismail Tolla Muhammad Idris, Aris Munandar, "Evolusi Sistem Pendidikan Di Indonesia: Sejarah Dan Perkembangan Pendidikan Di Indonesi," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 1494–1505.

<sup>47</sup> Oellien Noeha Aldi Cahya Maulidan, "Juang Tjitjih: Pejuang Pendidikan, Ekonomi, Politik Dan Emansipasi Perempuan Di Cianjur Tahun 1940-1964," *Visi Sosial Humaniora (VSH)* 5, no. 2 (2024): 197–210.

<sup>48</sup> Evita Pratiwi, "Europeesche Lagere School Di Bojonegoro: Penyelenggaraan Hingga Munculnya Elite Intelektual Bumiputra (1892-1942)" (Universitas Airlangga, 2020), hlm. 2.

standar pendidikan di Eropa, pendidikan ELS ini minim akan muatan lokal dan lebih menekankan Hindia Belanda dalam perspektif kolonial.

Raden Ajeng Tjitjih kemudian mempelajari ilmu lainnya di ELS pada tingkatan lebih lanjut yang meliputi Bahasa Prancis, Bahasa Inggris, ilmu pasti, olahraga, dan pertanian. Pada pendidikan lanjutan ini terdapat pendidikan khusus yang didapatkan perempuan berupa pelajaran pekerjaan tangan yang relevan pada saat itu<sup>49</sup>. Pendidikan formal pertama yang didapatkan oleh Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih ini semakin memperkuat fondasi intelektual dan keterampilannya, dan menjadi modal penting bagi dirinya dan sekitarnya mengingat kesempatan pendidikan ini tidak dapat dirasakan oleh semua perempuan pada masa itu. Ia melanjutkan pendidikannya ke *Hogere Burger School* (HBS) di Bandung, ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di ELS, HBS adalah sekolah lanjutan tingkat menengah yang diperuntukkan orang Belanda dan *elite* pribumi dengan Bahasa Belanda tetap sebagai bahasa pengantarnya dan lama pendidikannya sekitar lima tahun<sup>50</sup>. Melalui pendidikannya di HBS, Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi semakin memperluas dan memperkuat keterampilannya dalam berbahasa asing dan menyelesaikan pendidikan di HBS selama lima tahun lamanya. Pendidikan yang diperolehnya tidak hanya sampai disitu, ia melanjutkan pendidikannya ke Jatinegara Jakarta tepatnya di *Prins Hendrik Algemene Middelbare School* (PAMS) yang merupakan institusi pendidikan yang berfokus pada administrasi publik, keberhasilannya mendapatkan kesempatan pendidikan di PAMS tidak terlepas dari peran ayahnya yang pernah menjabat sebagai Wedana Masteer Cornelis di Jatinegara sebelum menjadi Bupati di Cianjur. Koneksi tersebut membuka peluang bagi Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan merupakan kesempatan yang tidak didapatkan oleh semua perempuan di masa kolonial<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 204.

<sup>50</sup> Tania Nandini, "Kinerja Pencakayaan Alami Ruang Kelas Bangunan Kolonial Hoogere Burger School (HBS) Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hlm. 7.

<sup>51</sup> *Op.cit*, hlm. 205.

Pendidikan yang ditempuh oleh Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih hingga tingkat PAMS mencerminkan latar belakang dirinya berasal dari keluarga *menak* yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, karena pada masa kolonial tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang mumpuni. Faktornya adalah tidak sembarang orang dapat memperoleh pendidikan gaya barat, pada tahun 1910 calon murid yang akan masuk ke HBS harus mampu membayar uang sekolah yang amat tinggi dan mengikuti ujian yang meliputi berhitung, Bahasa Belanda, dan Bahasa Prancis<sup>52</sup>. Kaum *menak* atau golongan bangsawan sebagai satu-satunya kalangan yang dapat mengakses pendidikan Barat di abad ke-19, namun tidak semua *menak* bersedia menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Eropa dengan berbagai alasan, lain halnya dengan Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih yang telah dipersiapkan pendidikannya sehingga terlihat bahwa dirinya berasal dari keluarga yang mendukung terhadap pengembangan intelektualnya<sup>53</sup>. Latar belakang pendidikan Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih menunjukkan bahwa terbukanya akses terhadap pendidikan barat membentuk cara pandang serta adanya kesadaran sosial yang kemudian menjadi landasan dirinya bagi keterlibatannya dalam lingkungan masyarakat.

Akses terhadap pendidikan Barat menjadi faktor penting dalam memperoleh kemampuan intelektual dan terbuka terhadap nilai-nilai modern seperti kebebasan individu, rasionalitas, dan kesetaraan. Hal tersebut melahirkan kesadaran kritis terhadap kondisi perempuan dan melalui pendidikan modern membuka peluang dirinya untuk melampaui batas perempuan yang hanya berperan di ranah domestik, kondisi ini sejalan dengan pemikiran Mary Wollstonecraft bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dan apabila perempuan mengalami keterhambatan hal ini disebabkan karena kurangnya akses terhadap pendidikan<sup>54</sup>. Maka dari itu kesetaraan kesempatan dan

---

<sup>52</sup> Api Nurhayati Sugiyono, Aman, Dyah Kumalasari, Sutopo, *Peta Jalan Pendidikan Indonesia* (UNY Press, 2020), hlm.33.

<sup>53</sup> Andrea Dinurul Aeni et al., "Gerakan Emansipasi Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Jawa Barat Pada Awal Abad Kedua Puluhan," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah* 5, no. 1 (2022): 4.

<sup>54</sup> Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, ed. Jonathan Bennett, 2017th ed. (Early Modern Texts, 1972), hlm.6.

hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang terutama dalam pendidikan dan partisipasi sosial perlu ditingkatkan, dan memandang bahwa ketimpangan sosial pada perempuan dan laki-laki bukan disebabkan oleh perbedaan gender melainkan adanya hambatan struktural dan norma sosial yang membatasi akses perempuan terhadap ruang publik. Pendidikan yang didapatkan oleh Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih menjadi sarana untuk membangun kesadaran akan pentingnya pemberdayaan sosial bagi perempuan, dan pendidikan yang dijalannya mencerminkan pemikiran feminisme bahwa perempuan memiliki potensi yang setara dengan laki-laki namun memerlukan akses yang sama terhadap pendidikan dan ruang publik untuk mewujudkan keselarasan tersebut.

### 2.3 Lingkungan Sosial Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih

Struktur sosial masyarakat di Cianjur tidak dapat dipisahkan dari warisan sistem sosial Priangan yang terbentuk sejak awal abad ke-19, dimana terdapat pembagian antara golongan elite dengan masyarakat biasa, secara umum terdapat tiga golongan masyarakat di Priangan, yaitu *menak* sebagai golongan sosial paling tinggi, *santana* sebagai golongan menengah, dan *cacah; somah; somahan* sebagai kelas paling bawah. Struktur atau posisi dalam masyarakat pada saat itu ditentukan oleh beberapa faktor, yang pertama karena faktor keturunan dari seorang penguasa, yang kedua karena posisi seseorang dalam birokrasi pemerintah, dan yang terakhir memiliki kepemilikan terhadap tanah<sup>55</sup>. Struktur sosial yang paling atas adalah bupati sebagai *menak* paling tinggi begitupun dengan keluarganya, kemudian disusul dengan pejabat-pejabat kabupaten yang berasal dari kerabat bupati yang dikategorikan sebagai *santana* atau *menak* rendah. Kedudukan bupati semakin diperkuat ketika Belanda berhasil menguasai seluruh Jawa pada tahun 1830 dan secara otomatis mempertahankan struktur sosial masyarakat pribumi, hal ini dimanfaatkan oleh Belanda sebagai alat pendukung eksploitasi kolonial karena bupati memiliki ikatan yang erat dengan

---

<sup>55</sup> Mumuh Muhsin, "Struktur Sosial, Politik, Dan Pemilik Tanah Di Priangan Abad Ke-19," *Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Bandung* 3, no. 3 (2011): hlm. 387.

rakyatnya<sup>56</sup>. Bupati pada saat itu memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemimpin tradisional dan sebagai kepala daerah, pada satu sisi bupati harus melindungi rakyatnya, namun di sisi lain ia sebagai bawahan pemerintah kolonial harus menjalankan perannya secara legal.

Raden Ajeng Tjitjih yang terlahir dari keluarga *menak* yaitu keluarga yang memiliki kelas sosial atau golongan bangsawan dan mendapatkan gelar kebangsawanan sesuai dengan status dan kedudukan ayahnya sebagai bupati, gelar yang dimilikinya adalah *nyi raden* yang ditujukan untuk anak perempuan dan adapun gelar yang diperuntukkan anak laki-laki adalah *raden*<sup>57</sup>. Nama ataupun gelar kaum *menak* biasanya berubah-ubah seiring dengan perubahan umur, status, dan jabatan, ketika lahir biasanya mendapatkan nama kecil berupa panggilan kesayangan seperti *aom* dan *juag* untuk putra dan putri bupati, sehingga Raden Ajeng Tjitjih mendapatkan sapaan *Juag Tjitjih* oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk menghargai putri dari bupati. Status *menak* ini pada dasarnya bersifat turun temurun, terutama akan diturunkan kepada garis keturunan laki-laki, begitupun dalam hal kekuasaan yang bersifat turun temurun seperti halnya kedudukan bupati di Cianjur yang diturunkan dari Raden Aria Wiratanu I (*Dalem Cikundul*)<sup>58</sup>.

Keluarga *menak* terkemuka di Cianjur berasal dari garis keturunan Dalem Aria Wiratanudatar, namun tidak semua bupati Cianjur memakai gelar “Wiratanudatar” seperti Raden Wiranatakusumah dan Raden Suriadiningrat yang bukan berasal dari keturunan Wiratanudatar, sehingga tetap tidak termasuk kedalam *menak* Cianjur. Penggunaan nama Wiratanudatar hanya sampai pada Wiratanudatar VI dan setelahnya posisi Bupati Cianjur digantikan oleh Prawiradiredja (keponakan) yang bila dilihat dari garis ayahnya berasal dari keturunan keempat Wiratanudatar IV, sedangkan dari garis ibu berasal dari

---

<sup>56</sup> *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>57</sup> Mirna Nur Alia Abdullah, *Mapag Menak: Kontruksi Modal Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2025, hlm. 1.

<sup>58</sup> Agus Mulayana, *Kongres Nasional Sejarah 1996*, 2nd ed. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997), hlm. 146.

keturunan ketiga Wiratanudatar V<sup>59</sup>. Gelar Tumenggung Wiradiredja kemudian diberlakukan dan digunakan juga oleh ayah Raden Ajeng Tjitjih, dan sebagai putri dari Prawiradiredja II ia tentunya tidak diwarisi kekuasaan sebagai bupati, namun dirinya tetap melakukan hal yang akan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Kehidupan sosial Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih yang berada dalam lingkup keluarga *menak* menjadikannya sebagai orang yang memiliki status sosial tinggi, ia begitu dihormati oleh masyarakat sekitarnya sebagai keturunan bupati. masyarakat beranggapan bahwa bupati merupakan posisi tertinggi di kabupatennya, status sosial yang dimiliki tersebut melahirkan sejumlah hak istimewa yang tidak dimiliki semua orang seperti hak pendidikan yang ia peroleh<sup>60</sup>. Etiket pun perlu diperhatikan olehnya sebagai pencerminan suatu sikap dan tindakan dan digunakan untuk menunjukkan kedudukan dan kehormatannya, ketika masa kanak-kanak seorang *menak* diharuskan mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat sekaligus mempraktekannya terkait etiket, bahasa, dan agama<sup>61</sup>. Hal ini dilakukan pula oleh Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih yang mendapat pengajaran dari *ajengan* dari Ciharashas berupa pengajaran agama, kepemimpinan, moral, dan etika.

Tumbuh dalam lingkungan pendopo yang menjadi pusat kekuasaan lokal menjadikannya terbiasa dalam hidup yang penuh tatakrama, ia menghabiskan waktunya disana hingga usia sembilan tahun dan dipenuhi berbagai kegiatan bersama teman-teman sebayanya. Hubungan kaum *menak-somah* merupakan hubungan *anu kawasa* (yang berkuasa) dengan *anu teu kawasa* (yang tidak berkuasa), *somah* menganggap bahwa bupati merupakan raja mereka yang menentukan hidupnya<sup>62</sup>. Perbedaan status tersebut menciptakan jarak diantaranya, kaum *menak* biasanya hanya bergaul dengan kalangan mereka sendiri dan tidak bergaul dengan *somah*, namun Raden Ajeng Tjitjih Wiarsih memiliki sikap egaliter yang terbiasa bermain dengan anak-anak seusianya tanpa membedakan

---

<sup>59</sup> Bayu Suryaningrat, *Sajarah Cianjur Sareng Raden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur* (Rukun Wargi Cianjur, 1982), hlm. 94.

<sup>60</sup> Lubis, "Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942," hlm. 147.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 254.

<sup>62</sup> *Op.cit*, hlm.142.

golongan. Hal ini diceritakan oleh Aom Pepet bahwa neneknya pernah bercerita pada dirinya, ketika kecil Raden Ajeng Tjtjih sering mengundang teman-temannya untuk bermain bersama di pendopo kabupaten dan salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah berenang di *empang dalem*, sehingga sosoknya dikenal sebagai yang mudah bergaul dan tidak sepenuhnya terikat pada batas sosial antara kaum *menak* dan masyarakat biasa. Keluarga menak harus memiliki tata krama seperti *tabeat luhung* (tabiat yang luhur), memiliki pertimbangan untuk menentukan baik buruknya sesuatu, kepintaran, keberanian, keteguhan hati, kerajinan, dan ilmu<sup>63</sup>.

Lingkungan sosial dengan norma tradisional tidak membatasi ruang geraknya terhadap peluang modernasi, ia tidak sepenuhnya mengikuti batasan tradisional sebagai perempuan dengan hanya bergerak dalam ruang domestik saja, namun dirinya aktif bergerak di ruang publik hingga mengejar pendidikan ke berbagai kota seperti Sukabumi, Bandung, dan Jakarta. Lingkungan sosialnya tidak hanya terbentuk karena nilai-nilai tradisional tetapi pengaruh kolonial dan proses modernisasi membentuknya menjadi pribadi yang paham akan kondisi masyarakat sekitarnya. Hal ini tidak terlepas dari keistimewaannya sebagai kaum *menak* dalam mendapatkan pendidikan barat, sehingga tak jarang disebut sebagai *menak intelektual* yang akan melahirkan pemikiran dan perubahan sosial. Raden Ajeng Tjtjih yang telah mendapatkan pendidikan Barat memiliki pandangan bahwa hubungan feodal yang berada di lingkungannya perlu diubah sehingga tidak terdapat jarak pemisah antar masyarakat.

---

<sup>63</sup> Erik Rusmana, *Konsep Menak Dalam Babad Panjalu* (Konferensi Internasional: Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Indonesia, 2015), hlm.157.